

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonsia* ,Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group.
- Andy Hartanto J, 2017,*Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-undang Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Wantjik Saleh K, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Prodjodikro, R Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Sumur Bandung.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahmida Erliyani, dan Fatma Surah, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, Bantul, K-Media.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang - undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pres, Surabaya.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Subekti, R, 1994, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ihtiar Baru an Hoeve.

Zakiah, 2011, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, Pustaka Felicha.

### **Tesis**

Dwi Ratna Kartikawaty, *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin Di kota Bandung ( Tesis Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2005)*.

Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan agama”, (Makalah pada Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Balikpapan, 10-14 Oktober, 2010).

### **Jurnal**

Abdul Rokhim, “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume IV Nomor 1 (Januari 2012).

Erlando Parsaroan Sibirian, “Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Harta Warisan Dan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–VIII/2010 Tentang Masalah Anak Luar Kawin”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume III Nomor 3 (Juli-September 2015).

Fhauzi Prasetyawan, “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU–XIII/2015”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (April 2018).

Hanafii Arif, “Perjanjian *RechtsVinding* Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Indonesia)”, *Jurnal Al’ Adl*, Volume IX, Nomor 02 (Agustus 2017).

- Komang Padma Patmala Adi dan Suatra Putrawan, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 1 Nomor 11 (November 2013).
- Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6 Nomor 1 (April 2017).
- Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Khatulistiwa*, Volume 6 Nomor 1 (Maret 2016).
- Sriono, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 04 Nomor 02 (September 2016).
- Wisda Rauyani Efa Rahmatika, “Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 (September 2017).
- Yulies Tiena Masriani, “Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Serat Acitya*, Volume 3 Nomor 2 ( November 2013).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.